



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN



ANALISIS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KOMINFO TAHUN 2024

ANALISIS KINERJA

Analisis kinerja Perangkat Daerah merupakan proses menilai, mengukur, dan mengevaluasi hasil kerja dari individu, tim, unit kerja, atau organisasi secara keseluruhan, untuk mengetahui sejauh mana target atau tujuan telah tercapai. Kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen Tahun 2024 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Tujuan analisis kinerja adalah:

- Mengetahui efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas.
- Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses kerja.
- Memberikan dasar untuk pengambilan keputusan, seperti promosi, pelatihan, atau perbaikan sistem.
- Mendorong peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Untuk itu kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah–langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dimulai dari proses perencanaan kinerja, pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja serta pelaporan kinerja. Dalam proses perencanaan kinerja sudah termuat indikator-indikator kinerja yang merupakan tingkat capaian yang akan mendukung tujuan dan sasaran.

Analisis capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan dilakukan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan akuntabilitas Kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen tidak terlepas dari sistem penganggaran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yang tetap harus dipertimbangkan dalam rangka menyesuaikan sasaran serta strategi

pencapaiannya dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Selanjutnya rencana kinerja yang telah disesuaikan dengan anggaran yang tersedia menjadi suatu penetapan kinerja antara Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode evaluasi kinerja yaitu:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	Lebih dari 100%	Sangat baik
2	≥85 – 100%	Baik
3	≥65 – 85%	Cukup
4	≥50 – 65%	Kurang
5	Kurang dari 50%	Sangat Kurang

Sumber : PermenPANRB No.54 Tahun 2014

Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pengawasan. Untuk mengukur capaian kinerja sampai dengan akhir tahun 2024, Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi yang seluruhnya dibiayai oleh APBD Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024. Adapun capaian kinerja Dinas Kominfo adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen dengan membandingkan target dan realisasi kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2 Kinerja Dinas Kominfo Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya tata kelola SPBE	Indeks SPBE	Indeks	3,50	4,07	116,28	Sangat Baik	KepmenPAN-RB nomor 663 Tahun 2024
2	Meningkatnya pengelolaan <i>website</i> satu data	Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP	%	100,00	100,00	100,00	Baik	Diskominfo Kab. Kebumen
3	Meningkatnya layanan administrasi Desa dan Kelurahan yang berbasis teknologi informasi	Persentase Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa dan Kelurahan	%	83,48	94,35	113,02	Sangat Baik	Diskominfo Kab. Kebumen
Kinerja Organisasi (Rata-Rata Nilai)						109,76	Sangat Baik	Data diolah dari standar PermenPANRB No.54 Tahun 2014

Berdasarkan tabel 2, Capaian indikator kinerja utama meningkatnya indeks SPBE dari target 3,50 (kategori baik) terealisasi 4,07 (sangat baik) atau 116,28% (sangat baik). Ketersediaan infrastruktur SPBE dan tersedianya regulasi terkait implementasi SPBE merupakan faktor pendorongnya.

Capaian indikator sasaran meningkatnya layanan administrasi Desa dan Kelurahan yang berbasis teknologi informasi dari target 83,48% (384 Desa dan Kelurahan) terealisasi 94,35% (434 Desa dan Kelurahan) atau capaian kinerja 113,02% (sangat baik). Sosialisasi pentingnya Keamanan Informasi telah meningkatkan jumlah Desa dan Kelurahan mempunyai SSL (*Secure Socket Layer*) yang digunakan untuk menciptakan koneksi yang lebih aman antara *website* dan *browser*.

2. Pengukuran kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen dengan membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3 Perbandingan Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Indeks SPBE	Indeks SPBE	3,43	3,44	100,30	3,45	3,70	107,24	3,50	4,07	116,28
2.	Meningkatnya pengelolaan <i>website</i> satu data	Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Meningkatnya layanan administrasi Desa dan Kelurahan yang berbasis teknologi informasi	Persentase Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa dan Kelurahan	38,91	39,56	101,67	61,30	70,65	115,25	83,48	94,35	113,02

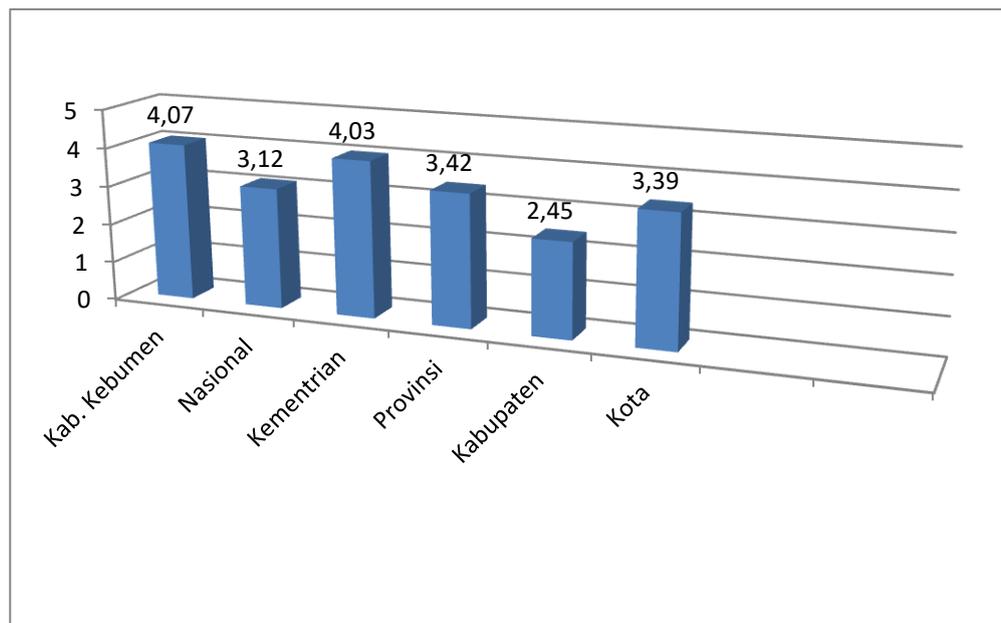
Bila dilihat dari tabel 3, capaian indikator kinerja Persentase Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa dan Kelurahan mengalami peningkatan dari 17,39% pada tahun 2021 menjadi 94,35% pada tahun 2024. Capaian indikator kinerja Indeks SPBE juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 nilai indeks SPBE 3,05 menjadi 4,07 pada tahun 2024.

3. Pengukuran kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 3 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir 2026	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Indeks SPBE	Indeks SPBE	4,07	3,60	116,28
2.	Meningkatnya pengelolaan website satu data	Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP	100,00	100,00	100,00
3.	Meningkatnya layanan administrasi Desa dan Kelurahan yang berbasis teknologi informasi	Persentase Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa dan Kelurahan	94,35	100,00	113,02

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional



Gambar 1 Perbandingan Capaian Indeks SPBE 2024

Berdasarkan Gambar 1, Capaian Indeks SPBE Kabupaten Kebumen Tahun 2024 sudah sangat baik bahkan di atas nilai rata-rata nilai indeks SPBE nasional, Kementrian, Provinsi, Kabupaten dan Kota.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Tabel 4 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi
1	Meningkatnya Indeks SPBE	Indeks SPBE	3,50	4,07	116,28	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman formal untuk manajemen SPBE belum optimal karena belum ada rujukan dan panduan yang jelas; • Belum adanya <i>tools</i>/alat bantu untuk layanan TIK. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menginisiasi penyusunan pedoman formal manajemen formal; • Mengembangkan atau mengadopsi <i>tools</i> untuk memantau, mengelola, dan mengevaluasi layanan TIK
2	Meningkatnya pengelolaan <i>website</i> satu data	Persentase OPD yang Mengisi <i>website</i> Satu Data sesuai SOP	100,00	100,00	100,00	Kegiatan Forum Satu Data Kebumen belum optimal	Monitoring dan evaluasi secara berkala dalam tata kelola Satu Data Indonesia
3	Meningkatnya layanan administrasi Desa dan Kelurahan yang berbasis teknologi informasi	Persentase Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa dan Kelurahan	83,48	94,35	113,02	Kesadaran dan pemahaman terhadap keamanan data dan kerahasiaan informasi masih rendah	Sosialisasi pentingnya Keamanan Informasi

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penghitungan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen adalah 3,51%. Penghitungan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dengan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran, sebagaimana rumus dibawah ini:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi) - RAKi}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

E = efisiensi

PAKi = pagu anggaran keluaran i

RAKi = realisasi anggaran

keluaran i CKi = capaian keluaran

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 5 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Meningkatnya Indeks SPBE		Indeks SPBE	116,28%	Menunjang
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	10 dokumen	Menunjang
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	12 bulan	Menunjang
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 kegiatan	Menunjang
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 bulan	Menunjang
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	40 unit	Menunjang
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Pemerintah daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	Menunjang
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	Menunjang

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks PPID	100%	Menunjang
		Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PPID OPD dan Desa dan Kelurahan dalam kondisi baik	176 PPID OPD dan Desa dan Kelurahan	Menunjang
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Nilai Domain Layanan SPBE dalam Penilaian Indeks SPBE	127,98%	Menunjang
		Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah paket layanan infrastruktur	10 paket	Menunjang
		Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi pendukung SPBE	100 aplikasi	Menunjang
2	Meningkatnya pengelolaan website satu data		Persentase OPD yang mengisi website Satu Data sesuai SOP	100%	Menunjang
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang mengisi website Satu Data sesuai SOP	100%	Menunjang
		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen statistik sektoral yang tersedia	1 dokumen	Menunjang

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
3	Meningkatnya layanan administrasi Desa dan Kelurahan yang berbasis teknologi informasi		Persentase Desa dan Kelurahan yang menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam layanan administrasi Desa dan Kelurahan	113,02%	Menunjang
			Persentase Desa dan Kelurahan yang menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam layanan administrasi Desa dan Kelurahan	113,02%	Menunjang
			Jumlah Desa dan Kelurahan dan Kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi Desa dan Kelurahan dan kelurahan	434 Desa dan Kelurahan	Menunjang

Adapun untuk capaian kegiatan, dari 12 kegiatan terdapat 11 kegiatan yang capaian kinerjanya 100% dan 1 kegiatan yang capaiannya 113,02% yakni Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Target kinerja kegiatan adalah target pada DPA dan DPPA TA 2024. Adapun penjelasan capaian kinerja kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, target 10 dokumen realisasi 10 dokumen yaitu Renja TA 2025, RKA TA 2024, RKAP TA 2024, DPA TA 2024, DPPA TA 2024, LKJIP TA 2024, LPPD TA 2023, Dokumen Perjanjian Kinerja, Dokumen Pengukuran Kinerja, dan Dokumen Rakor POP;
2. Kegiatan Administrasi Keuangan, target 12 bulan realisasi 12 bulan;
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian, target 1 kegiatan realisasi 1 kegiatan;
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, target 12 bulan realisasi 12 bulan, meliputi penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan bahan logistik, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan bahan material, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, target 40 unit realisasi 40 unit yaitu pengadaan *lighting, mic wireless*, baterai kamera, *drone*, LED, *headphone*, laptop, *printer* dan *hardisk* untuk pembuatan *podcast*;
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah, target 12 bulan realisasi 12 bulan yaitu penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa pelayanan umum kantor;
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah target 12 bulan realisasi 12 bulan. Kegiatan pemeliharaan meliputi pemeliharaan 21 unit kendaraan roda 2 dan 11 unit kendaraan roda 4, pembayaran pajak kendaraan, pemeliharaan

- peralatan dan mesin lainnya, dan rehabilitasi gedung kantor;
8. Kegiatan Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik target 176 PPID OPD dan Desa dan Kelurahan dalam kondisi baik, realisasi 176 PPID OPD dan Desa dan Kelurahan. Kegiatan ini terbagi dalam 3 sub kegiatan yaitu: 1) Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan hasil 11.315 jam siar Kebumen TV dan Radio In FM selama 1 tahun; 2) Pelayanan Informasi Publik dengan hasil 176 PPID OPD dan Desa dan Kelurahan dalam kondisi baik; dan 3) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Kemitraan dan Media Komunitas dengan realisasi 1 kali pertemuan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat 1 kali) dan 3 kali pertemuan FK Metra (Forum Komunikasi Media Tradisional);
 9. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan realisasi 10 paket pengadaan, yang terdiri dari pengadaan sewa koneksi internet untuk koneksi IP transit (utama), pengadaan sewa koneksi internet untuk koneksi IP transit (*redundant*), pengadaan jasa *maintenance tower wireles*, pengadaan jasa *maintenance data center*, pengadaan jasa *maintenance link*, Pengadaan jasa *maintenance* tiang *fiber optik*, pengadaan suku cadang peralatan jaringan, dan pengadaan *Personal Computer*;
 10. Kegiatan Pengelolaan *e-government* di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, memelihara 100 aplikasi aktif pendukung SPBE dari target 100 aplikasi. Terdiri dari 2 subkegiatan yakni 1) Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Berbasis Elektronik; dan 2) Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintahan Daerah;
 11. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan output menyediakan 1 dokumen statistik sektoral. Terdiri dari 1 subkegiatan yakni Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral;
 12. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di

Lingkup Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan output 431 Desa dan Kelurahan dan kelurahan yang menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam layanan administrasi Desa dan Kelurahan dan kelurahan. Terdiri dari 2 Subkegiatan yaitu 1) Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik; 2) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Penyebab keberhasilan kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen Tahun 2024, yaitu komitmen pimpinan yang tinggi dan dukungan dari semua pegawai yang terlibat.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen, program yang dilaksanakan antara lain:

1. Statistik/Satu Data

Implementasi Satu Data di Kabupaten Kebumen telah mencapai langkah signifikan dengan diterbitkannya Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 42 tahun 2021. Selain itu, juga telah terbentuk Forum Satu Data Kebumen yang diatur melalui Surat Keputusan Bupati. Untuk mendukung efektivitas pengelolaan data, Kepala Dinas Kominfo juga menerbitkan Surat Keputusan tentang Petunjuk Teknis Pengumpulan Data, Pemeriksaan Data, dan Penyebarluasan Data. Inovasi ini melibatkan pembentukan portal resmi satudata.kebumenkab.go.id, yang menjadi sarana utama untuk menampung, mengelola, dan menyebarluaskan data. Portal Satu Data telah dimanfaatkan oleh seluruh Perangkat Daerah (100%) di Kabupaten Kebumen. Dengan demikian, langkah-langkah tersebut menciptakan landasan hukum, kelembagaan, dan infrastruktur digital yang kokoh untuk mewujudkan integrasi dan pemanfaatan data yang holistik di Kabupaten Kebumen.

➤ Faktor Pendorong

- Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 42 Tahun 2021: Adanya Perbup yang mengatur Satu Data Kabupaten Kebumen menjadi pendorong utama untuk implementasi konsep Satu Data. Ini menciptakan dasar hukum yang kuat untuk penyelenggaraan Satu Data.

- Forum Satu Data Kebumen: Keberadaan SK Bupati yang membentuk Forum Satu Data memberikan wadah formal bagi kolaborasi dan koordinasi antarstakeholder dalam pengelolaan data.
 - Petunjuk Teknis Pengumpulan, Pemeriksaan, dan Penyebarluasan Data: SK Kepala Dinas Kominfo yang mengatur petunjuk teknis memberikan pedoman operasional yang jelas untuk pengelolaan data, meningkatkan efisiensi dan kualitas data.
 - Portal Resmi Satu Data: Adanya portal satudata.kebumenkab.go.id menciptakan infrastruktur digital yang mendukung pengumpulan, penyimpanan, dan distribusi data secara terpusat dan terintegrasi.
- Hambatan
- Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan anggaran, SDM, dan teknologi menjadi hambatan utama dalam pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur serta kegiatan pengelolaan data
 - Tingkat Kesadaran dan Keterlibatan Stakeholder: Rendahnya kesadaran dan keterlibatan beberapa stakeholder terkait dapat menghambat kesuksesan program Satu Data.
 - Kurangnya Koordinasi Antar Instansi: Kurangnya koordinasi dan komunikasi antarinstansi dapat menghambat integrasi data secara menyeluruh.
- Upaya Untuk Meningkatkan
- Optimalisasi Sumber Daya: Meningkatkan alokasi anggaran, peningkatan kompetensi SDM, dan investasi dalam teknologi guna mendukung infrastruktur data yang lebih kuat.
 - Sosialisasi dan Pelibatan Stakeholder: Melakukan program sosialisasi secara intensif untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan semua pihak terkait, termasuk instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat.
 - Penguatan Koordinasi Antar Instansi: Membentuk mekanisme koordinasi yang efektif antarinstansi untuk memastikan keselarasan dan kerjasama dalam pengelolaan data.
 - Pemantapan Portal Satu Data: Terus melakukan pemantapan dan

pengembangan portal Satu Data, termasuk memastikan keamanan data dan penyediaan fitur yang mendukung aksesibilitas dan analisis data yang lebih baik.

2. Tanda Tangan Elektronik Kepala Desa dan Kelurahan

Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi adalah tanda tangan yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi secara digital menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) Indonesia yang diakui oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tanda tangan elektronik di Kabupaten Kebumen telah diimplementasikan sampai kepala Desa dan Kelurahan, yang dilakukan melalui kerjasama dengan Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber, dan Sandi Negara sebagai PSrE. Manfaat utama dari penggunaan tanda tangan elektronik bagi kepala Desa dan Kelurahan adalah percepatan layanan administrasi Desa dan Kelurahan melalui aplikasi Desa dan Kelurahan Online Kebumen. Ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam proses administratif, tetapi juga memberikan kemudahan akses kepada masyarakat Desa dan Kelurahan dalam mengajukan berbagai permohonan dan mendapatkan pelayanan secara digital. Dengan demikian, implementasi tanda tangan elektronik menjadi langkah progresif untuk meningkatkan pelayanan publik di tingkat Desa dan Kelurahan dengan memanfaatkan teknologi digital secara optimal.

Per Januari 2024 sebanyak 431 Kepala Desa dan Kelurahan dari jumlah total 460 Desa dan Kelurahan/kelurahan di Kabupaten Kebumen telah diterbitkan tanda tangan elektronik dan dapat diimplementasikan untuk mempercepat pelayanan administrasi Desa dan Kelurahan melalui aplikasi Desa dan Kelurahan *online* kebumen. Sebagai monitoring atas penggunaan tanda tangan elektronik di Kabupaten Kebumen dapat diakses melalui <https://sitekonik.kebumenkab.go.id/>.

➤ Faktor Pendorong

Faktor pendorong paling utama dalam implementasi Tanda Tangan Elektronik di Kabupaten Kebumen adalah komitmen yang

tinggi dari Kepala Daerah hal ini dibuktikan dengan penggunaan Tanda Tangan Elektronik oleh Kepala Daerah beserta jajarannya untuk menandatangani dokumen elektronik. Selain factor utama tersebut, juga terdapat beberapa faktor pendorong lain:

- Dukungan Regulasi: Adanya dukungan regulasi yang memungkinkan penggunaan tanda tangan elektronik, seperti peraturan yang memfasilitasi legalitas dan pengakuan tanda tangan elektronik, memberikan dasar hukum yang kuat untuk implementasi.
 - Kemajuan Teknologi: Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan pendorong signifikan untuk mengadopsi tanda tangan elektronik, memungkinkan proses administratif menjadi lebih efisien dan modern.
 - Kerjasama dengan Instansi Terkait: Kolaborasi dengan Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber, dan Sandi Negara menjadi pendorong penting, karena memperkuat dukungan dan pemahaman teknis yang diperlukan untuk implementasi tanda tangan elektronik.
- Hambatan
- Keterbatasan Infrastruktur dan Teknologi: Infrastruktur dan teknologi yang kurang memadai di tingkat Desa dan Kelurahan dapat menghambat penggunaan tanda tangan elektronik, memerlukan investasi dalam pembaruan dan peningkatan teknologi.
 - Keamanan Data: Keprihatinan terhadap keamanan data dan kerahasiaan informasi dapat menjadi hambatan, khususnya jika masyarakat atau pemerintah Desa dan Kelurahan merasa kurang yakin terhadap keamanan penggunaan tanda tangan elektronik.
- Upaya untuk meningkatkan:
- Sosialisasi dan Edukasi: Melakukan sosialisasi dan edukasi secara intensif kepada kepala Desa dan Kelurahan dan masyarakat Desa dan Kelurahan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran

terkait manfaat dan prosedur penggunaan tanda tangan elektronik.

- Peningkatan Infrastruktur Teknologi: Investasi dalam peningkatan infrastruktur dan teknologi di tingkat Desa dan Kelurahan untuk memastikan ketersediaan sumber daya yang cukup untuk mendukung implementasi tanda tangan elektronik.
- Pengembangan Kebijakan Pendukung: Menyusun kebijakan pendukung yang memastikan keamanan dan validitas tanda tangan elektronik, serta memberikan insentif bagi kepala Desa dan Kelurahan yang mengadopsi teknologi ini.
- Kolaborasi dengan Pihak Terkait: Memperkuat kolaborasi dengan Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber, dan Sandi Negara untuk memberikan dukungan teknis dan regulasi yang diperlukan untuk keberhasilan implementasi tanda tangan elektronik di Kabupaten Kebumen.

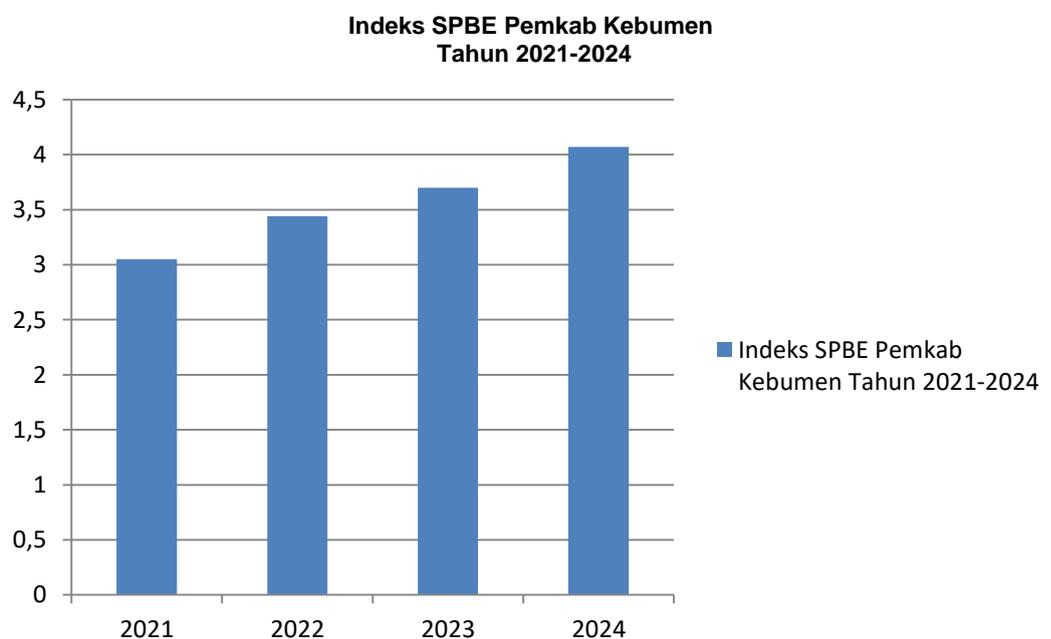
3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal.

Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Adapun tahapan evaluasi tersebut

antara lain Penilaian Mandiri oleh K/L/D/I (Asesor Internal), Penilaian Dokumen, Penilaian Interview, Penilaian Visitasi, Harmonisasi, Pengumuman Final oleh Asesor Eksternal Kementerian PANRB. Sampai Desember 2024, masih ada ditahap Harmonisasi, sehingga belum ada hasil final (dalam bentuk Keputusan Menpan RB) yang ditetapkan. Sehingga dalam laporan ini menggunakan hasil penilaian dokumen yang dilakukan oleh Asesor Eksternal Kementerian PAN RB.

Indeks SPBE Pemkab Kebumen secara umum mengalami kenaikan dari tahun 2021 sampai tahun 2024. Indeks tahun 2024 (berdasarkan penilaian dokumen oleh Asesor Eksternal Kementerian PAN RB) telah mencapai 4,07 atau predikat Sangat Baik.



➤ **Faktor Pendorong**

Beberapa faktor pendorong terhadap implementasi SPBE di Kabupaten Kebumen antara lain:

- Implementasi Kebijakan Internal dan Tata Kelola: Adanya kebijakan internal yang mengatur arsitektur, peta rencana, manajemen keamanan informasi, dan audit teknologi informasi menjadi pendorong utama penerapan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kebumen.
- Layanan SPBE yang Terintegrasi: Keunggulan dalam integrasi

layanan administrasi pemerintahan, kepegawaian, dan layanan publik menggunakan aplikasi berbagi pakai serta aplikasi internal menciptakan ekosistem yang mendukung efisiensi dan efektivitas pelayanan.

➤ Hambatan

Beberapa hambatan yang ada antara lain:

- Kurangnya pedoman formal untuk manajemen SPBE, seperti pedoman kompetensi SDM, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan;
- Belum adanya *tools*/alat bantu untuk proses Manajemen Layanan TIK, sehingga layanan TIK yang ada belum dapat termonitor dengan jelas;
- Belum tersedianya pedoman formal menyebabkan manajemen SPBE belum berjalan optimal, terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan, karena tidak ada rujukan dan panduan yang jelas.

➤ Upaya untuk meningkatkan:

- Menginisiasi penyusunan pedoman formal untuk kompetensi SDM, manajemen pengetahuan, dan manajemen perubahan melalui tim koordinasi SPBE Pemkab Kebumen;
- Mengadopsi standar nasional atau internasional terkait manajemen SPBE dan menyesuaikannya dengan kebutuhan lokal;
- Mengembangkan atau mengadopsi *tools* berbasis teknologi untuk memantau, mengelola, dan mengevaluasi layanan TIK;
- Menyusun rencana aksi implementasi pedoman formal Bersama Tim Koordinasi SPBE sebagai bagian dari dokumen perencanaan strategis pemerintah daerah;
- Membentuk mekanisme monitoring berkala untuk mengevaluasi pelaksanaan manajemen SPBE, termasuk penerapan pedoman formal dan penggunaan *tools* layanan TIK.

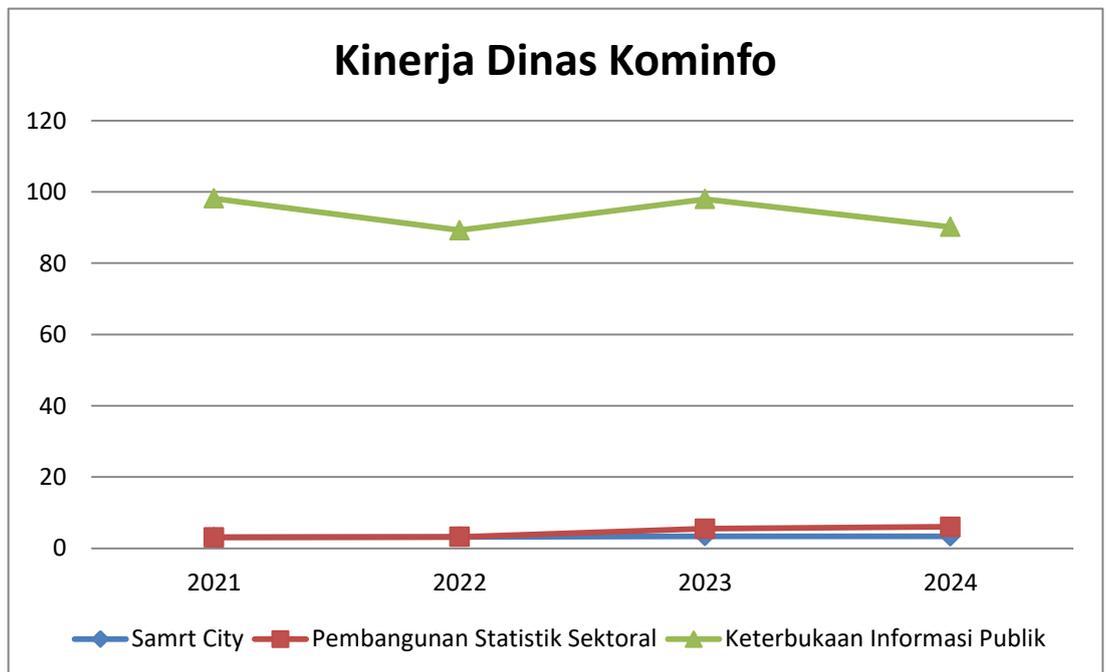
4. Program Lainnya

Selain tiga program utama di atas, Dinas Kominfo Kab. Kebumen juga melaksanakan program Smartcity yang dinilai oleh Kementerian Kominfo, Pembangunan Statistik Sektoral yang dinilai oleh Badan Pusat Statistik, dan Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan penilaian oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Hasilnya secara umum sudah baik, dengan kemajuan dari tahun 2021- 2024 sebagaimana terlihat dalam tabel..

Tabel 6 Tabel Kinerja Dinas Kominfo Kab.Kebumen

No	Nama Program	Kinerja Setiap Tahun (Indeks/Nilai/Kategori)			
		2021	2022	2023	2024
1	Smart City	3,05	3,21	3,37	3,34
2	Pembangunan Statistik Sektoral	-	-	2,11 (Cukup)	2,69 (Baik)
3	Keterbukaan Informasi Publik	95,09 (Informatif)	86,00 (Menuju Informatif)	92,46 (Informatif)	84,13 (Menuju Informatif)

Sumber: Data diolah dari beberapa Referensi



Berdasarkan Tabel 7, Nilai Program Smart City mengalami kenaikan dari 3,05 (Tahun 2021) menjadi 3,34 (Tahun 2024) begitu pula dengan Nilai

Pembangunan Statistik Sektorial dari 2,11 (Tahun 2023) menjadi 2,69 (Tahun 2024). Sedangkan Nilai dan Kategori Keterbukaan Informasi Publik mengalami penurunan dari 92,46 (Informatif) menjadi 84,13 (Menuju Informatif). Hal ini disebabkan karena ketika dilakukan penilaian, *website* PPID dalam proses *maintenance* (pemeliharaan).

3.2. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen tahun 2024 merupakan salah satu aspek yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian kinerja utama untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Alokasi anggaran melalui APBD Tahun 2024 untuk Dinas Kominfo sebesar Rp10.855.338.000,- dengan realisasi Rp10.474.540.945,- atau serapan 96,49%.

Alokasi anggaran dan realisasi dari masing-masing program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran strategis Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 7 Data Realisasi Anggaran TA. 2024

Nama Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.533.097.000	4.246.770.101	93,68
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.000.000	23.698.250	98,74
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.859.113.000	2.671.488.830	93,44
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	195.307.000	156.962.000	80,37
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat	80.000.000	79.633.900	99,54

Nama Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
	(Rp)	(Rp)	(%)
Daerah			
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	442.777.000	436.920.000	98,68
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	563.028.000	516.721.149	91,78
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	368.872.000	361.345.972	97,96
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.988.963.000	2.963.321.691	99,14
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.988.963.000	2.963.321.691	99,14
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	3.114.504.000	3.059.992.533	98,25
Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.310.798.000	2.261.457.192	97,86
Kegiatan Pengelolaan <i>e-government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	803.706.000	798.535.341	99,36
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	55.680.000	51.013.321	91,62

Nama Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
	(Rp)	(Rp)	(%)
Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	55.680.000	51.013.321	91,62
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	163.094.000	153.443.299	94,08
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	163.094.000	153.443.299	94,08
JUMLAH	10.855.338.000	10.474.540.945	96,49

Berdasarkan tabel 8, realisasi keuangan TA 2024 Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen sebesar 96,49%. Dari 5 program, program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang persentase penyerapannya paling tinggi yakni 99,14% dan dari 12 kegiatan, penyerapan tertinggi ada pada kegiatan Pengelolaan *e- government* di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 99,36% dan terendah kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yakni 80,37% karena adanya jasa iklan dan reklame yang tidak dibelanjakan karena penyelenggaraan reklame di LPPL Radio In Fm dan LPPL Kebumen Televisi bukan merupakan objek daerah retribusi menurut Perda No 11 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Tabel 8 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik				10.855.338.000	10.474.540.945	96,49	3,51%
	Persentase OPD yang Mengisi <i>website</i> Satu Data sesuai SOP	100,00	100,00	100,00				
2	Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel							
	Persentase Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa dan Kelurahan	83,48	93,70	112,31				
3	Terwujudnya Birokrasi yang kapabel	3,50	4,07	116,28				
	Meningkatnya Indeks SPBE	3,50	4,07	116,28				